



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng**

Jalan Jendral Sudirman No. 60, Telp. (0362) 21884

Web Site : [http //www.kesbang.bulelengkab.go.id](http://www.kesbang.bulelengkab.go.id),

Email : bkbp@bulelengkab.go.id

**Triwulan IV
2020**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Capaian Rencana Aksi Triwulan III atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi capaian/realisasi target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 ini diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19640311 198503 1 017



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Struktur Organisasi..... | 2 |
| 1.3. Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)..... | 5 |
| | |
| BAB II. CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA | 6 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis | 6 |
| 2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama | 7 |
| | |
| BAB III. PENUTUP | 9 |
| Lampiran | 10 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggung jawabkan nya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2017-2022, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.



Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu, dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Dasar penilaian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

1.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi :



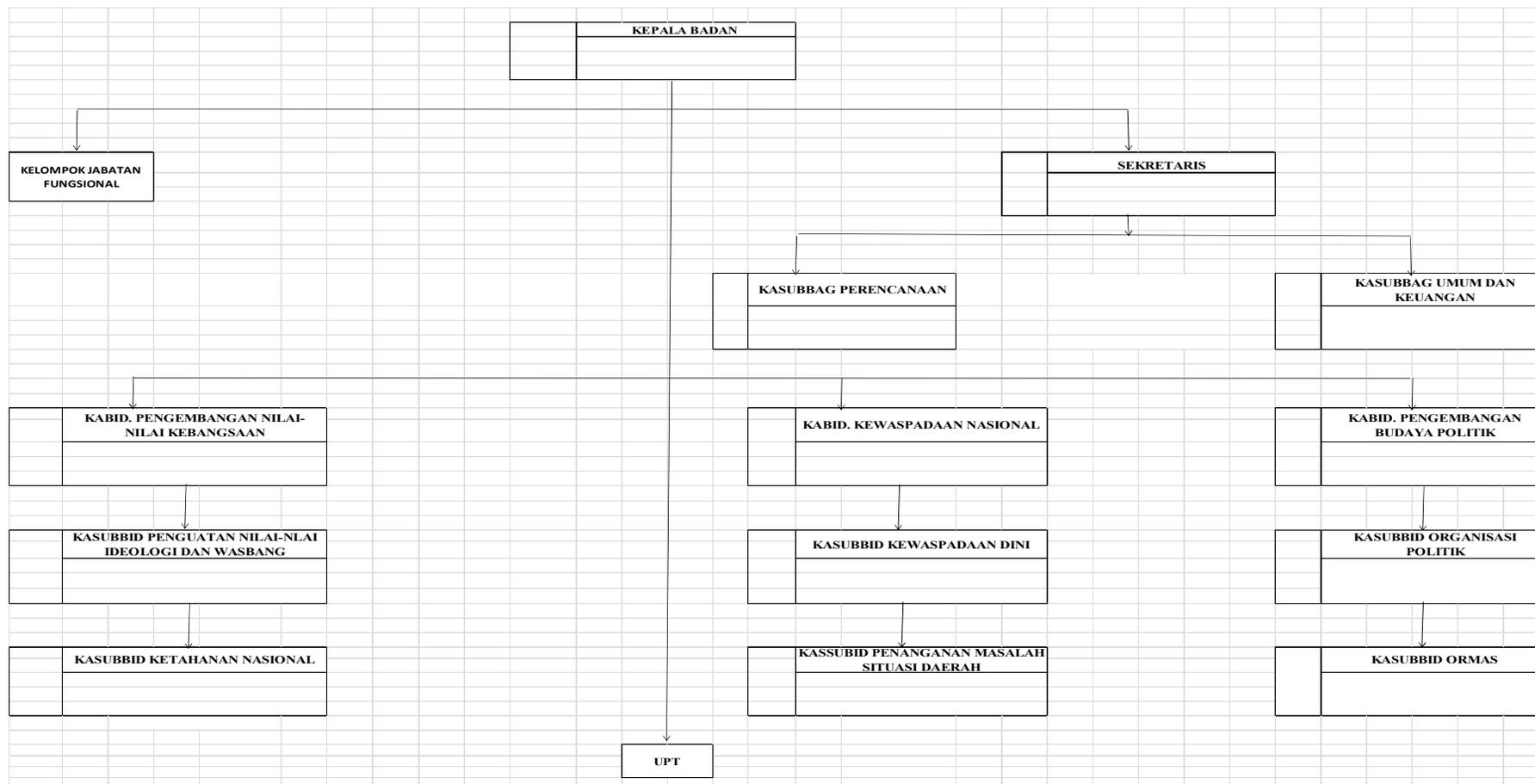
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Kepala Sub Bidang Ketahanan Nasional
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
 - Kepala Sub Bidang Penanganan Situasi Daerah
- e. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik membawahi :
 - Kepala Sub Organisasi Politik
 - Kepala Sub Organisasi Kemasyarakatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :



Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Bagan 1. Susunan Organisasi & Tata Kerja



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 “*Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana*”, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang mengemban urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksanaannya mendukung **Misi ke-4** dari Kepala Daerah mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam



pembangunan dengan tujuan Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan dan sasaran strategis dibidang politik yaitu Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 (Tahun ke-4).

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk



menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah untuk mengukur tingkat capaian, konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2020.

Kegiatan yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajava
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19640311 198503 1 017



LAMPIRAN

***CAPAIAN RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
TRIWULAN IV TAHUN 2020***

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|------------------------|--------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---|------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama | 1. Persentase penurunan konflik antar umat beragama | Persen | 50 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 103.275.300 | Triwulan I | 25.818.825 | 11.400.000 | 44,2 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan II | 38.108.000 | 38.108.000 | 100,0 | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan III | 23.400.800 | 23.400.800 | 100,0 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 50 | 50 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 15.947.675 | 30.160.000 | 189,1 | | |
| | | | | | | | | | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | 222.750.000 | Triwulan I | 55.687.500 | 16.800.000 | | 30,2 |
| | | | | | | | | | Triwulan II | | | | 55.687.500 | 29.080.000 | 52,2 | | |
| | | | | | | | | | Triwulan III | | | | 55.687.500 | 35.294.200 | 63,4 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 58.187.500 | 141.417.700 | 243,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 584.675.400 | Triwulan I | 146.168.850 | 30.500.000 | 20,9 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | | | 146.168.850 | 75.243.250 | 51,5 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | | | 210.760.000 | 210.760.000 | 100,0 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 84.077.700 | | 269.293.100 | 320,3 | | | | | | | | |
| | Tenwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik | 1. Persentase partisipasi masyarakat dalam politik | Persen | 90 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 263.837.100 | Triwulan I | 65.959.275 | 22.620.000 | 34,3 | | |
| Triwulan II | | | | | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Triwulan II | | | 85.757.275 | 41.857.200 | 48,8 | | | |
| Triwulan III | | | | | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Triwulan III | | | 85.757.275 | 73.942.411 | 86,2 | | | |
| Triwulan IV | | | | | 90 | 90 | 100,00 | | Triwulan IV | | | 105.555.275 | 192.133.984 | 182,0 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19640311 198503 1 017

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|-------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|--|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan | 1. Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan | Persen | 80 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 103.275.300 | Triwulan I | 25.818.825 | 11.400.000 | 44,2 | Kabid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan II | 38.108.000 | 38.108.000 | 100,0 | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan III | 23.400.800 | 23.400.800 | 100,0 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 80 | 80 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 15.947.675 | 30.160.000 | 189,1 | | |
| 2 | Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat | 1. Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan ketahanan nasional | Persen | 90 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 222.750.000 | Triwulan I | 55.687.500 | 16.800.000 | 30,2 | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan II | 55.687.500 | 29.080.000 | 52,2 | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan III | 55.687.500 | 35.294.200 | 63,4 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 90 | 90 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 58.187.500 | 141.417.700 | 243,0 | | |
| 3 | Meningkatnya kewaspadaan masyarakat | 1. Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 584.675.400 | Triwulan I | 146.168.850 | 30.500.000 | 20,9 | Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan II | 146.168.850 | 75.243.250 | 51,5 | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan III | 210.760.000 | 210.760.000 | 100,0 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 100 | 100 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 84.077.700 | 269.293.100 | 320,3 | | |
| 4 | Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat | 1. Persentase peningkatan pendidikan masyarakat di bidang politik | Persen | 87 | Triwulan I | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 263.837.100 | Triwulan I | 65.959.275 | 22.620.000 | 34,3 | Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan II | 85.757.275 | 41.857.200 | 48,8 | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | dihitung di akhir tahun | | | Triwulan III | 85.757.275 | 73.942.411 | 86,2 | | |
| | | | | | Triwulan IV | 87 | 87 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 105.555.275 | 192.133.984 | 182,0 | | |
| | | 2. Jumlah ormas dalam partisipasi pembangunan | Ormas | 6 | Triwulan I | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas Kinerja SKPD | 1. Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur | Persen | 100 | Triwulan I | 25 | 25 | 100,00 | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 642.451.050 | Triwulan I | 160.612.763 | 65.336.296 | 40,7 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--------|------------------------|----------|--------|-----------|---|------------|------------------|-------------------------|----------|--------|-----------|----|------------|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|---|--|--|--|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan | 1. Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan | Orang | 150 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat | 103.275.300 | Triwulan I | 25.818.825 | 11.400.000 | 44,2 | Kepala Sub. Bidang Penguatan Nilai nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 50 | 50 | 100,00 | | | | Triwulan II | 38.108.000 | 38.108.000 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 50 | 50 | 100,00 | | | | Triwulan III | 23.400.800 | 23.400.800 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 50 | 50 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 15.947.675 | 30.160.000 | 189,1 | | | | | |
| | | 2. Jumlah pentas seni wawasan kebangsaan | Pentas Seni | 1 | Triwulan I | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat | 1. Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama | Orang | 150 | Triwulan I | 30 | 0 | 0,00 | | Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | 225.250.000 | Triwulan I | 55.687.500 | 16.800.000 | 30,2 | Kepala Sub. Bidang Ketahanan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 40 | 40 | 100,00 | | | | Triwulan II | 55.687.500 | 29.080.000 | 52,2 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 40 | 70 | 175,00 | | | | Triwulan III | 55.687.500 | 35.294.200 | 63,4 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 40 | 40 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 58.187.500 | 141.417.700 | 243,0 | | | | | |
| | | 2. Jumlah tokoh agama yang ikut serta rakor kerukunan umat beragama | Orang | 20 | Triwulan I | 5 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 5 | 5 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 5 | 10 | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 5 | 5 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya kewaspadaan masyarakat | 1. Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat | Pemantauan/mon ev | 2 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 256.600.000 | Triwulan I | 64.150.000 | 7.600.000 | 11,8 | Kepala Sub. Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan II | 64.150.000 | 13.452.850 | 21,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 1 | 1 | 100,00 | | | | Triwulan III | 104.450.000 | 104.450.000 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 23.850.000 | 130.479.600 | 547,1 | | | | | |
| 4 | Meningkatnya kewaspadaan masyarakat | 1. Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi | Konflik | 6 | Triwulan I | 1 | 0 | 0,00 | | Penanganan konflik sosial | 165.575.400 | Triwulan I | 41.393.850 | 11.500.000 | 27,8 | Kepala Sub. Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 2 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan II | 41.393.850 | 31.490.400 | 76,1 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 2 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan III | 51.610.000 | 51.610.000 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 6 | 600,00 | | | | Triwulan IV | 31.177.700 | 70.291.000 | 225,5 | | | | | |
| | | 2. Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing | Monev | 2 | Triwulan I | 1 | 0 | 0,00 | | Pemantauan orang asing | 165.000.000 | Triwulan I | 41.250.000 | 11.400.000 | 27,6 | Kepala Sub. Bidang Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 1 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan II | 41.250.000 | 30.300.000 | 73,5 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 1 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan III | 54.700.000 | 54.700.000 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 2 | 200,00 | | | | Triwulan IV | 27.800.000 | 68.522.500 | 246,5 | | | | | |
| 5 | Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat | 1. Jumlah monitoring evaluasi penyelenggaraan pemilu | Monev | 0 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol | 165.503.100 | Triwulan I | 41.375.775 | 11.220.000 | 27,1 | Kepala Sub. Bidang Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | Triwulan II | 41.375.775 | 21.305.300 | 51,5 | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | | | | Triwulan III | 23.569.000 | 23.569.000 | 100,0 | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | - | - | 0,00 | | | | Triwulan IV | 59.182.550 | 108.208.484 | 182,8 | | | | | |
| | | 2. Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik | Parpol | 8 | Triwulan I | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------|--------|--------------|--------|------------|--|-------------------------|---|-------------|------------|-------|---|---|-----|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | 3. Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi pendidikan politik | Orang | 0 | Triwulan III | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 2 | 2 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Jumlah tim pendidikan politik masyarakat | Tim | 1 | Triwulan III | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan I | 1 | 1 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Jumlah rakor tim pendidikan politik masyarakat | Rakor | 0 | Triwulan III | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat | 1. Jumlah ormas yang terverifikasi | Ormas | 6 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Organisasi Kemasyarakatan | 76.987.700 | Triwulan I | 19.246.925 | 11.400.000 | 59,2 | Kepala Sub. Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng | | | |
| | | | | | Triwulan II | 2 | 2 | 100,00 | 19.100.000 | | | 99,2 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 2 | 2 | 100,00 | 18.853.005 | | | 98,0 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 2 | 2 | 100,00 | 27.481.700 | | | 142,8 | | | | | | | |
| | | 2. Jumlah monev ormas | Monev | 9 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu | 100.538.300 | Triwulan I | 25.134.575 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 3 | 0 | 0,00 | 1.451.900 | | | 5,8 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 3 | 6 | 200,00 | 31.520.406 | | | 100,0 | | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 3 | 3 | 100,00 | 56.443.800 | | | 301,1 | | | | | | | |
| | | 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas Kinerja SKPD | 1. Jumlah bulan terbayarnya sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris | Bulan | 12 | Triwulan I | 3 | 3 | 100,00 | | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 192.032.000 | Triwulan I | 0 | | 0 | 0,0 | |
| | | | | | | | Triwulan II | 3 | 3 | 100,00 | 33.008.000 | | | 15.991.800 | 48,4 | | | | |
| | | | | | | | Triwulan III | 3 | 3 | 100,00 | 95.950.800 | | | 95.950.800 | 100,0 | | | | |
| | | | | | | | Triwulan IV | 3 | 3 | 100,00 | 63.073.200 | | | 79.959.000 | 126,8 | | | | |
| 2. Jumlah dokumen administrasi keuangan disusun | Dokumen | | | 120 | Triwulan I | 30 | 20 | 66,67 | | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | 151.271.200 | Triwulan I | 37.817.800 | 24.000.000 | 63,5 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 30 | 40 | 133,33 | 39.160.400 | | | 39.160.400 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 30 | 30 | 100,00 | 39.160.400 | | | 37.786.000 | 96,5 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 30 | 30 | 100,00 | 35.132.600 | | | 50.219.000 | 142,9 | | | | | | |
| 3. Jumlah Rapat dan konsultasi ke luar atau dalam daerah yang terlaksana | Kali Perjalanan | | | 5 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah | 6.958.000 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 1 | 0 | 0,00 | 4.150.000 | | | 4.150.000 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 1 | 3 | 300,00 | 0 | | | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | 2.808.000 | | | 2.800.000 | 99,7 | | | | | | |
| 4. Jumlah upacara keagamaan yang terlaksana | Kali upacara | | | 46 | Triwulan I | 2 | 1 | 50,00 | | Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara | 53.009.535 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 19 | 19 | 100,00 | 25.574.000 | | | 25.574.000 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 18 | 18 | 100,00 | 14.970.200 | | | 14.970.200 | 100,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 9 | 9 | 100,00 | 12.465.335 | | | 12.325.000 | 98,9 | | | | | | |
| 5. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun | Dokumen | | | 18 | Triwulan I | 2 | 2 | 100,00 | | Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2.000.000 | Triwulan I | 500.000 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 5 | 5 | 100,00 | 500.000 | | | 412.000 | 82,4 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | 5 | 5 | 100,00 | 500.000 | | | 326.000 | 65,2 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 5 | 5 | 100,00 | 500.000 | | | 1.262.000 | 252,4 | | | | | | |
| 6. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun | Laporan | | | 1 | Triwulan I | - | - | 0,00 | | Penyusunan pelaporan akhir tahun | 361.000 | Triwulan I | 90.250 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | 90.250 | | | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | 90.250 | | | 0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | 90.250 | | | 361.000 | 400,0 | | | | | | |
| 7. Jumlah buku/dokumen anggaran SKPD yang tersusun | Buku | | | 17 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Penyusunan anggaran SKPD | 105.416.000 | Triwulan I | 26.354.000 | 17.200.000 | 65,3 | | | | |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0,00 | 26.354.000 | | | 26.016.000 | 98,7 | | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|---|--------------|--|--|--------|------------|--|-------------------------|--------------|------------|------------|-------|--|
| | | | | Target Kinerja Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan | Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 8. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara | Paket | 1 | Triwulan III | 10 | 10 | 100,00 | | | | Triwulan III | 26.354.000 | 25.800.000 | 97,9 | |
| | | | | | Triwulan IV | 7 | 7 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 26.354.000 | 36.400.000 | 138,1 | |
| | | | | | Triwulan I | - | - | 0,00 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 45.303.300 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan II | - | - | 0,00 | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan III | - | - | 0,00 | | | | Triwulan III | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 45.303.300 | 45.218.520 | 99,81 | |
| 8. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas Kinerja SKPD | 1. Jumlah surat terkirim pada 1 tahun | Lembar | 2.000 | Triwulan I | 500 | 486 | 97,20 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 129.900.000 | Triwulan I | 32.475.000 | 21.000.000 | 64,7 | Kepala Sub. Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng |
| | | | | | Triwulan II | 500 | 656 | 131,20 | | | | Triwulan II | 32.475.000 | 35.100.000 | 108,1 | |
| | | | | | Triwulan III | 500 | 423 | 84,60 | | | | Triwulan III | 32.475.000 | 31.500.000 | 97,0 | |
| | | | | | Triwulan IV | 500 | 516 | 103,20 | | | | Triwulan IV | 32.475.000 | 42.300.000 | 130,3 | |
| | | 2. Jumlah terbayarnya rekening Biaya Air, Listrik dan Telpon | Rekening (bulan) | 36 | Triwulan I | 9 | 9 | 100,00 | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 108.346.250 | Triwulan I | 27.086.563 | 13.988.796 | 51,6 | |
| | | | | | Triwulan II | 9 | 9 | 100,00 | | | | Triwulan II | 35.100.000 | 31.390.475 | 89,4 | |
| | | | | | Triwulan III | 9 | 9 | 100,00 | | | | Triwulan III | 23.079.844 | 31.500.000 | 136,5 | |
| | | | | | Triwulan IV | 9 | 9 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 23.079.844 | 21.599.199 | 93,6 | |
| | | 3. Jumlah unit Kendaraan dinas/operasional yang pajaknya terbayarkan | Unit | 37 | Triwulan I | 3 | 3 | 100,00 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 8.000.000 | Triwulan I | 347.500 | 347.500 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan II | 20 | 20 | 100,00 | | | | Triwulan II | 3.297.500 | 3.297.500 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan III | 1 | 1 | 100,00 | | | | Triwulan III | 3.297.500 | 1.057.300 | 32,1 | |
| | | | | | Triwulan IV | 13 | 13 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 1.057.500 | 1.737.500 | 164,3 | |
| | | 4. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia | buah, botol, kaleng, kotak, bungkus | 7 buah, 28 botol, 9 kaleng, 5 kotak, 10 bungkus | Triwulan I | 5 buah, 16 botol, 4 kaleng, 3kotak, 9bungkus | 5 buah, 16 botol, 4 kaleng, 3kotak, 9bungkus | 100,00 | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 38.432.000 | Triwulan I | 9.608.000 | 6.000.000 | 62,4 | |
| | | | | | Triwulan II | 3 Kotak | 3 Kotak | 100,00 | | | | Triwulan II | 9.608.000 | 10.564.400 | 110,0 | |
| | | | | | Triwulan III | 2 Buah, 12 Botol, 5 Kaleng | 2 Buah, 12 Botol, 5 Kaleng | 100,00 | | | | Triwulan III | 12.867.400 | 12.867.400 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan IV | 2 Buah, 12 Botol, 5 Kaleng | 2 Buah, 12 Botol, 5 Kaleng | 100,00 | | | | Triwulan IV | 6.348.600 | 9.000.000 | 141,8 | |
| | | 5. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Rim, Buah, Botol, Kotak, | 190 Rim, 983 Buah, 62 Botol, 60 Kotak | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 80.822.400 | Triwulan I | 20.205.600 | 0 | 0,0 | |
| | | | | | Triwulan II | 170 Rim, 567 Buah | 170 Rim, 567 Buah | 100,00 | | | | Triwulan II | 20.205.600 | 25.799.400 | 127,7 | |
| | | | | | Triwulan III | 20 Rim, 416 Buah | 20 Rim, 416 Buah | 100,00 | | | | Triwulan III | 14.450.260 | 14.450.260 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan IV | 20 Rim, 416 Buah | 20 Rim, 416 Buah | 100,00 | | | | Triwulan IV | 25.960.940 | 39.528.000 | 152,3 | |
| | | 6. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | Buku,LS,Lembar | 48 Buku, 1 LS, 54.000 Lembar | Triwulan I | 9040 Lembar | 24 Buku, 1 LS, 7750 Lembar | 100,00 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9.795.200 | Triwulan I | 2.448.800 | 2.448.800 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan II | 28 Buku, 22.600 Lembar | 76 buku, 11625 lembar | 100,00 | | | | Triwulan II | 2.448.800 | 2.448.800 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan III | 4520 Lembar, 8 Buku | 4520 Lembar, 8 Buku | 100,00 | | | | Triwulan III | 2.448.800 | 2.448.800 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan IV | | | 0,00 | | | | Triwulan IV | 2.448.800 | 2.448.800 | 100,0 | |
| | | 7. Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia | Buah, Pcs | 142 Buah, 200 Pcs, 100 Meter | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.296.700 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,0 | |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0,00 | | | | Triwulan II | 3.915.000 | 3.915.000 | 100,0 | |
| | | | | | Triwulan III | 46 pcs | 46 pcs | 100,00 | | | | Triwulan III | 381.700 | 3.024.800 | 792,5 | |
| | | | | | Triwulan IV | | | 0,00 | | | | Triwulan IV | 0 | 0 | 0,0 | |
| | | 8. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Unit | 1 | Triwulan I | 0 | - | 0,00 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.500.000 | Triwulan I | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan II | 0 | - | 0,00 | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan III | 0 | - | 0,00 | | | | Triwulan III | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100,00 | | | | Triwulan IV | 1.500.000 | 1.347.500 | 89,8 | |
| | | 9. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia | Eksemplar | 1.116 | Triwulan I | 62 | 62 | 100,00 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.560.000 | Triwulan I | 1.890.000 | 0 | 0,0 | |
| | | | | | Triwulan II | 144 | 144 | 100,00 | | | | Triwulan II | 1.890.000 | 1.260.000 | 66,7 | |

